

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal dan teknologi yang digunakan berkembang (Sukirno, 2015: 9).

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah manifestasi dalam upaya untuk mengisi kemerdekaan dan pencapaian kesejahteraan hidup rakyat. Melalui pembangunan ekonomi akan dapat diwujudkan cita-cita kemerdekaan seperti diamanatkan dalam konstitusi masing-masing negara. Dalam hal ini kesejahteraan dan kemakmuran hidup merupakan harapan dari rakyat dalam pencapaian kemerdekaannya. Melalui pembangunan ekonomi dapat dilakukan berbagai kegiatan pembangunan yakni melalui pengelolaan-pengelolaan sumber daya ekonomi yang tersedia dalam pembangunan. Sumber daya ekonomi tersebut meliputi; sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan teknologi (Christea dan Imam, 2016: 16).

Konsep pembangunan ekonomi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Konsep dasar pembangunan ekonomi berawal dari pengembangan konsep pembangunan ekonomi yang sangat terkait dengan pendapatan, pertumbuhan, dan investasi. Konsep pembangunan tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih luas cakupan dan dimensinya, meliputi pengetahuan dan teknologi, pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping ini, kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas (Irawan dan Suparmoko, 1979: 21).

Dasar pemikiran perlunya perluasan cakupan konsep pembangunan adalah adanya pemikiran akan terbatasnya peran dan fungsi pertumbuhan ekonomi yang semula dijadikan tujuan pembangunan. Fokus perhatian pembangunan kemudian diperluas sehingga mencakup distribusi pendapatan (*income distribution*), kemiskinan (*poverty*), dan pemenuhan kepentingan umum (*public services*). Perhatian terhadap pemerataan pembangunan (*equity*) kemudian berkembang sejalan dengan berbagai perdebatan terkait hubungan antara ketimpangan pendapatan (*inequality*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Teori pertumbuhan endogen yang berkembang di era 1980-an memfokuskan perhatian pada pentingnya kemajuan teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Penelitian dan pengembangan

teknologi diyakini mampu memfasilitasi investasi dan mengurangi biaya produksi. (Karmaji dalam Susanto, dkk, 2010: 83).

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang terjadi di Indonesia telah membuka jalan untuk terjadinya gerakan reformasi. Salah satu unsur reformasi itu adalah perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pembangunan daerah di negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang dikenal dengan sebutan pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut tentu akan mendorong kemandirian pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Desentralisasi sebenarnya sudah dikenal di Indonesia sejak dimulainya proses pembangunan ekonomi. Pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi merupakan salah satu azas di dalam undang-undang ini. Meskipun demikian, sejak tahun 1970-an sampai 3 dasawarsa, pemerintah pusat memegang penuh atas seluruh keputusan dan kebijakan pembangunan, pemerintah daerah hanya dalam posisi menjalankan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, atau lebih dikenal dengan sistem sentralistik (Candra, 2017: 3).

Seperti yang diketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus

berkembang dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk kemajuan daerah dan memakmurkan masyarakatnya. Kekayaan Indonesia begitu melimpah, baik dalam hal sumber daya alam, sosial budaya, dan karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda tersebar di seluruh daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat memahami karakteristik wilayahnya sehingga dapat mengelolanya secara maksimal.

Setiap daerah memiliki potensi perekonomian yang berbeda satu sama lain. Informasi mengenai potensi yang terdapat di daerah tersebut akan mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah itu sendiri, yaitu dengan terciptanya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dari pemerintah daerah.

Jika perekonomian di daerah-daerah berkembang maka secara nasional perekonomian Indonesia juga akan tumbuh dan masyarakat luas akan memperoleh manfaatnya. Untuk itu, pemimpin daerah perlu didukung dengan strategi yang memperhatikan keberagaman situasi dan kondisi yang dihadapi (Susanto dalam Susanto dkk, 2010: xi).

Oleh sebab itu, maka pembangunan daerah merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut. Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat dan efisien tentu diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mendirikan badan usaha

milik daerah dan juga melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sumberdaya yang tersedia agar tercipta berbagai lapangan usaha baru sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, juga terdapat suatu penekanan-penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dalam menggunakan potensi sumberdaya alam secara lokal atau daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan atau keadaan perekonomian suatu daerah antara lain tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan regional, tingkat pendapatan perkapita dan struktur pendapatan regional.

Kabupaten Sukabumi secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Posisi geografis Kabupaten Sukabumi berada di Barat Daya Provinsi Jawa Barat serta wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) di utara dan Samudera Hindia di bagian selatan, merupakan potensi yang sangat strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Menurut Saberan (dalam Wahyuningsih dan Zamzami, 2002: 5) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Selanjutnya adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

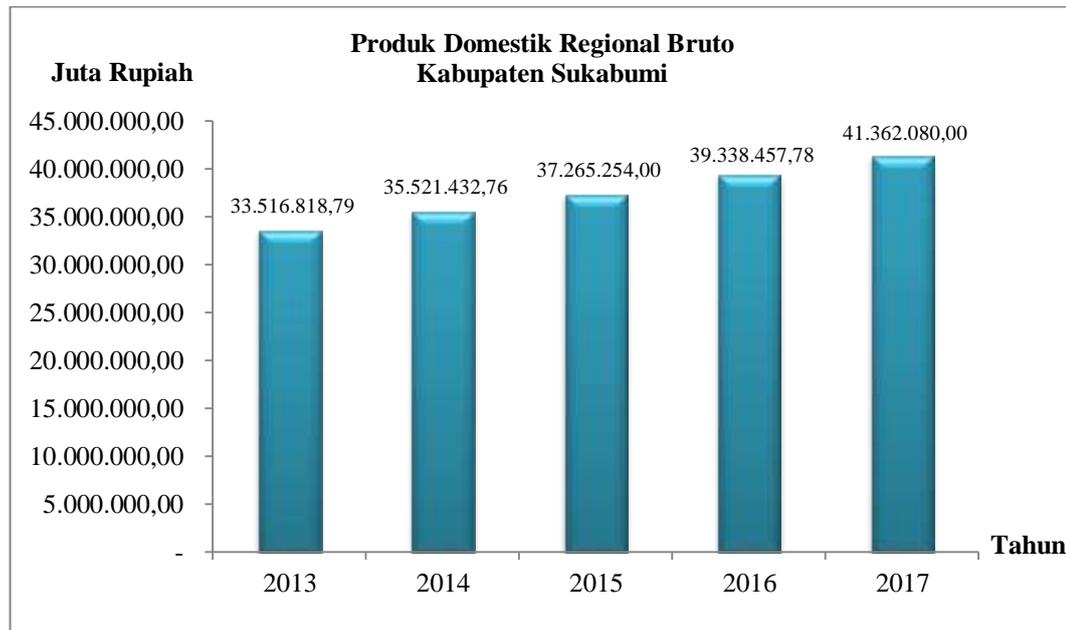
Perekonomian Kabupaten Sukabumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

**Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.398.703,04	7.762.747,15	7.721.977,42	8.132.060,82	8.076.960,00
Pertambangan dan Penggalian	2.877.453,08	2.946.519,96	2.962.339,64	2.946.630,52	2.921.930,00
Industri Pengolahan	5.119.906,41	5.403.872,61	5.693.039,25	6.076.661,78	6.486.590,00
Pengadaan Listrik dan Gas	35.376,61	37.233,11	38.515,65	40.588,90	41.850,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.971,33	9.431,56	9.854,45	10.488,23	11.260,00
Konstruksi	3.570.641,21	3.890.705,12	4.362.918,18	4.661.364,81	5.146.430,00
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.851.942,86	7.208.169,61	7.463.191,91	7.787.694,71	8.209.330,00
Transportasi dan Pergudangan	2.060.176,96	2.203.613,70	2.405.767,38	2.602.801,01	2.833.330,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832.277,79	881.496,71	923.383,49	959.240,95	1.039.760,00
Informasi dan Komunikasi	806.106,02	926.845,62	1.065.477,64	1.191.799,07	1.333.710,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	235.028,90	239.729,69	262.784,64	280.189,32	296.630,00
Real Estate	538.238,77	568.380,14	618.401,13	685.440,35	748.560,00
Jasa Perusahaan	102.801,10	107.554,78	114.828,79	122.853,10	133.070,00
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.038.664,81	1.039.643,43	1.099.882,75	1.112.020,09	1.114.930,00
Jasa Pendidikan	1.245.988,51	1.413.987,51	1.555.919,99	1.681.544,28	1.826.220,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	259.034,38	298.759,94	331.958,75	361.734,18	391.800,00
Jasa Lainnya	535.507,03	582.742,12	635.012,94	685.345,66	749.700,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>33.516.818,79</b>	<b>35.521.432,76</b>	<b>37.265.254,00</b>	<b>39.338.457,78</b>	<b>41.362.080,00</b>

Sumber : *website* BPS Kabupaten Sukabumi 2019

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten Sukabumi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2013-2017. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2017**

Sumber: *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar Rp. 8.209.330,00 juta rupiah pada tahun 2017. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan bagi perekonomian Kabupaten Sukabumi, karena memang memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi. Menurut data Produk Domestik Regional Bruto di atas juga dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan sektor yang

kontribusinya relatif kecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar Rp. 11.260,00 juta rupiah.

Perekonomian Kabupaten Sukabumi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan, dan dapat digeser oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sehingga menjadikan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017. Hal tersebut tidak sejalan dengan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa salah satu misi Kabupaten Sukabumi yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN SUKABUMI DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS LOCATION QUOTIENT DAN TIPOLOGI KLASSEN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut.

1. Sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2017?
2. Bagaimana klasifikasi sektor perekonomian Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2017?
3. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap Penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti didasari dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Sukabumi.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan kedepannya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan lebih mengenai analisis sektor unggulan di Kabupaten Sukabumi.
2. Penelitian selanjutnya, yaitu sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk peneliti berikutnya.
3. Bagi Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai bahan masukan dan bahan kajian mengenai sektor unggulan di Kabupaten Sukabumi sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan daerahnya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat melalui data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan juga *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian dimulai sejak Februari 2019 diawali dengan pengajuan judul dan penelitian kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Berikut matriks jadwal penelitian ini:

